

Melihat "Raport" Kinerja Reserse A la Carlo Tewu

BULAN lalu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrim) Polda Metro Jaya memaksa pengamat kepolisian dan wartawan senior bicara blak-blakan di hadapan 300 anggota reserse Polsek, Polres, dan Polda Metro Jaya dalam pertemuan setengah hari di Polda Metro Jaya. Tujuannya, mengetahui raport kinerja anggotanya di lapangan sekaligus untuk pembenahan.

SEBUAH langkah mengejutkan, sekaligus patut diberikan pujian. Sebab, meminta orang lain untuk menilai diri kita, memerlukan sebuah keberanian, memerlukan kesiapan mental dan kebesaran hati bila ternyata penilaiannya tak seperti harapan.

Khusus untuk jajaran Dir Reskrim, yang dikomandani polisi berpangkat Komisaris Besar senior Carlo Brix Tewu, langkah ini merupakan sebuah terobosan baru sekaligus pertanda bahwa reformasi di tubuh kepolisian tidak mandek dan terus bergulir hingga kini.

Bagaimana tidak, di tengah berbagai terpaan dan cemoan miring, mereka justru menantang pengamat kepolisian dan wartawan untuk bicara "buka-bukaan" dan memberi nilai "raport" apa adanya bagi kinerja anggotanya di lapangan, seburu apapun nilai itu.

Pengamat kepolisian Neta S Pane (Ketua Presidium Indonesia Police Watch) dan Gunawan Eko Probowo (Pemimpin Redaksi Harian Pos



Dir Reskrim Polda Metropolitan Jakarta Raya, Komisaris Besar Carlo Brix Tewu

FOTO: JT/EVA HARTINI

Kota) hadir dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 300 personel reserse, mulai dari Polsek, Polres dan Polda Metro Jaya.

"Hari ini saya mengajak pengamat kepolisian dan wartawan untuk bersama-sama bicara terbuka tentang bagaimana kinerja anggota reserse kami di lapangan, mohon masukannya agar kami bisa membenahi kinerja anggota kami," kata Kombes Pol Carlo Brix Tewu, akhir bulan lalu di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya.

Carlo menegaskan, pihaknya terbuka menerima segala bentuk masukan, kritikan dan penilaian mengenai lingkup tugas reserse, mulai dari penanganan pengaduan laporan masyarakat hingga penanganan berbagai kasus di lapangan, baik lisan maupun tertulis.

"Kami ingin masukan yang positif jadi mohon jangan ditutup-tutupi. Silahkan menyampaikan penilaian apa adanya. Kalau polisi jelek ya katakan jelek. Pokoknya saya mau penilaian dan kritikan yang paling tajam," tandas Carlo.

JANGAN LARUT DALAM "KEGILAAN" MASYARAKAT

Dalam pertemuan yang berlangsung setengah hari tersebut, Neta S Pane mengatakan, sesuai dogma Polri yang tersirat dalam Tri Brata, bahwa tugas dan misi utama polisi adalah sebagai penjaga moral masyarakat. Namun Neta tidak sependapat dengan berbagai teori yang mengatakan bahwa adalah sesuatu yang wajar bila polisi buruk dan korup, karena masyarakat juga berperilaku buruk dan korup.

"Kami tidak setuju dengan asumsi itu karena tugas dan misi utama polisi adalah penjaga moral masyarakat. Artinya, ketika seseorang menjadi polisi seharusnya menyadari bahwa dirinya terikat kontrak sosial sebagai petugas penjaga moral masyarakat," tegas Neta.

Menurut Neta, kontrak sosial tersebut mengharuskan seorang polisi harus mau dan mampu berjuang menumpas penyakit masyarakat. Maka itu, seorang polisi tidak boleh larut dalam kegilaan masya-

rakat. Polisi juga tidak boleh larut dalam keburukan maupun sifat korup yang menggerogoti masyarakat.

"Perilaku yang menyimpang seakan terbiarkan karena etika belum tertanam maksimal di lingkungan Polri. Padahal di banyak negara, antara etika dan korupsi polisi dianggap mempunyai kaitan erat. Bahkan rendahnya pengembangan dan pengawasan etika di kepolisian membuat maraknya korupsi di tubuh kepolisian," tandasnya.

Neta mencontohkan perilaku kepolisian Victoria, Australia. Untuk memberantas korupsi di tubuh kepolisian, mereka menanamkan nilai-nilai etika. Bahkan untuk menjamin tercapainya keberadaan polisi yang diharapkan masyarakat, kepolisian Victoria menerapkan standar etika yang tinggi, dan sekaligus memperbesar akuntabilitas masyarakat terhadap kepolisian.

Sementara Inggris mengintroduksi tiga unsur baru, yakni misi, strategi dan struktur organisasinya. Misi polisinya adalah mencegah kejahatan. Misi itu dicapai melalui strategi patroli pencegahan. Sedangkan struktur organisasinya dibangun secara kuat dengan mengadopsi organisasi militer, sehingga sistem komando menjadi kuat, sistem disiplin dan etikanya terkontrol secara ketat.

Neta menegaskan, dalam membangun organisasinya, Polri memang harus mendahulukan pembangunan etika, baru kemudian mengembangkan nilai-nilai profesionalisme. Sebab, etika polisi bukanlah tife khusus, tetapi lebih bersifat ekspresi dari etika umum dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas polisi.

"Intinya, anggota kepolisian harus senantiasa menampilkan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas-tugas pemolisianannya. Dan bila ingin berubah, pembangunan etika polisi merupakan modal awal yang utama untuk menjadikan polisi sebagai dambaan masyarakat," papar Neta.

Setelah etika, tahap berikutnya kemudian membangun kesadaran kepolisian bahwa mereka adalah pelayanan sosial. Tentunya, proses pembentukan dan pembangunan etika kepolisian ini juga perlu pengawasan secara ketat, baik secara internal maupun eksternal Polri.

"Pengawasan harus dilakukan dengan ekstra ketat secara urut-urutan. Dari atas ke bawah, dari bawah ke paling bawah, sehingga muncul budaya malu untuk berbuat cela. Kemudian pengasasan eksternal dilakukan tekanan maupun gerakan moral dari berbagai komponen atau institusi mitra polisi untuk menumbuhkembangkan kesadaran kepolisian bahwa tugas utama mereka sebagai pelayan sosial," ungkapnya.

RESERSE SEBAGAI FIRST GATE

Gunawan Eko Probowo dalam makalahnya bertema *Reserse dan Media* menyebutkan, Polri adalah institusi penegak hukum paling depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Konsekuensinya, lembaga Polri lebih mudah disorot ketimbang institusi lainnya seperti Kejaksaan, Kehakiman, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada era demokrasi sipil saat ini, kondisi itu kemudian ditambah lagi dengan harapan publik yang begitu besar terhadap penghargaan terhadap HAM, proses hukum yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial law enforcement*) dan mekanisme hukum yang dapat diakses setiap orang.

"Fungsi reserse menonjol dalam hal memerangi kejahatan dan sebagai *first gate* proses hukum pidana. Konsekuensinya, personil reserse mutlak harus memperhatikan values yang berkembang di masyarakat," tegas Eko Prabowo.

Menyoal tentang media dan Polri, Eko berpendapat, keduanya merupakan hal yang sama pentingnya. Polri (lebih spesifik reserse) bagi media adalah sumber berita penting. Sedangkan bagi Polri, media juga penting sebagai institusi pembentuk opini publik dan sa-

luran penyampaian informasi. Maka itu, relasi keduanya harus dikelola dengan baik.

Bedanya, terang Eko, reserse bekerja untuk mendapatkan kebenaran hukum, dan media bekerja untuk kebenaran fungsional. Lebih jelasnya, tujuan akhir reserse adalah hak keamanan publik (*public secure*). Sedangkan media untuk hak informasi publik (*right to know*) melalui pemberitaan. Hanya saja perbedaan ini kerap memunculkan 'gesekan'.

Menurut Eko, ada beberapa masalah relasi Polri dengan media. Di antaranya, sebagai lembaga besar, Polri rawan oleh penyimpangan perilaku anggota. Maka itu harus ada ukuran seberapa jauh dan bagaimana informasi perlu diberikan. Contoh lain misalnya, pemberian informasi tidak boleh bertendensi bohong atau menyesatkan publik. Tetapi dalam kegiatan intelijen atau reserse, hal itu menjadi cara yang

dimungkinkan.

"Dalam kasus-kasus besar, kerja reserse berpacu dengan investigasi media. Sehingga mau tidak mau profesionalisme penyelidikan/penyidikan dan manajemen informasi pun mutlak dilakukan. Artinya, publikasi media berperan penting atau *bad news is good news*," ujarnya.

Berdasarkan data 2007, kekerasan yang dilakukan anggota Polri didominasi oleh aksi penyalahgunaan senjata api (*senpi*), yakni terjadi delapan kali. Kemudian disusul data tentang kematian seorang anggota Polsek Cilamaya, Karawang yang tewas dikeroyok massa setelah menembak mati seorang warga pada Januari 2008.

Secara kuantitas, kasus atau pengaduan tersebut masih sangat kecil persentasenya dibandingkan jumlah Polri yang mencapai sekitar 400 ribu personel. Kasus *senpi* tidak sampai 0,01 persen. Sementara pengaduan masyarakat yang dipu-

blikasikan media juga relatif masih sedikit, hanya berkisar 2-3 persen.

Meski demikian, Eko menghimbau agar anggota Reserse sebaiknya menerapkan empat tindakan reserse dalam rangka penegakkan hukum. Bila keempat tindakan dimaksud diterapkan, paling tidak mampu mengurangi laporan pengaduan tindak kekerasan yang dimaksud di atas.

"Ada empat tindakan reserse dalam rangka penegakan hukum itu. Pertama, menggunakan kekerasan yang tidak mematkan (*non-deadly physical force*), penggunaan kekerasan yang *legitimate* atau memiliki dasar hukum dan moral jelas. Yang ketiga, mendukung dan menyetujui penggunaan kekerasan dalam upaya penyelamatan jiwa, termasuk anggota sendiri. Terakhir, tidak diskriminatif berdasarkan ras, agama dan status sosial ekonomi," tandas Eko.

[cil]

POLWILTABES SURABAYA

BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI

M E N G U C A P K A N

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Selamat & Sukses

ATAS DILANTIKNYA

Irjen Pol Drs Susno Djuadji SH, MSc

SEBAGAI KAPOLDA JAWA BARAT

Brigjen Pol Drs Budi Gunawan SH, MSi

SEBAGAI KAPOLDA JAMBI

Brigjen Pol Drs Timur Pradopo

SEBAGAI KA SELAPA POLRI

Kombes Pol Rumiah

SEBAGAI KAPOLDA BANTEN

Selamat mengemban tugas baru

KAPOLWILTABES SURABAYA

KOMBES POL Drs ANANG ISKANDAR





IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Mengucapkan
Selamat Atas Berlangsungnya Pernikahan

Ajeng Anjarsari
dengan
Kombes Pol Drs. Anon Charliyan, MPKN

Sinar Yulianti, S.Sos

dengan

Kombes Pol Drs. Bambang Sri Herwanto, M.H